

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2014

OUTLINE ANALISIS PROVINSI

1. Perkembangan Indikator Utama
 - 1.1 Pertumbuhan Ekonomi
 - 1.2 Pengurangan Pengangguran
 - 1.3 Pengurangan Kemiskinan
2. Kinerja Pembangunan Kota/ Kabupaten
 - 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan kemiskinan
 - 2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM
 - 2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran
 - 2.4 Kesenjangan Wilayah
3. Penyebab Permasalahan Pembangunan
 - 3.1 Ketergantungan Pada Sektor Primer Masih Besar
 - 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Didorong Konsumsi dan Investasi
 - 3.3 Rendahnya Kualitas Infrastruktur Wilayah
 - 3.4 Kualitas sumber daya manusia
 - 3.5 Kualitas Belanja Pemerintah Daerah Kurang Mendukung Pertumbuhan
 - 3.6 Daya Dukung Lingkungan Berkurang
4. Prospek Pembangunan Tahun 2015
5. Penutup
 - 5.1 Isu Strategis Daerah
 - 5.2 Rekomendasi Kebijakan



Desember 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

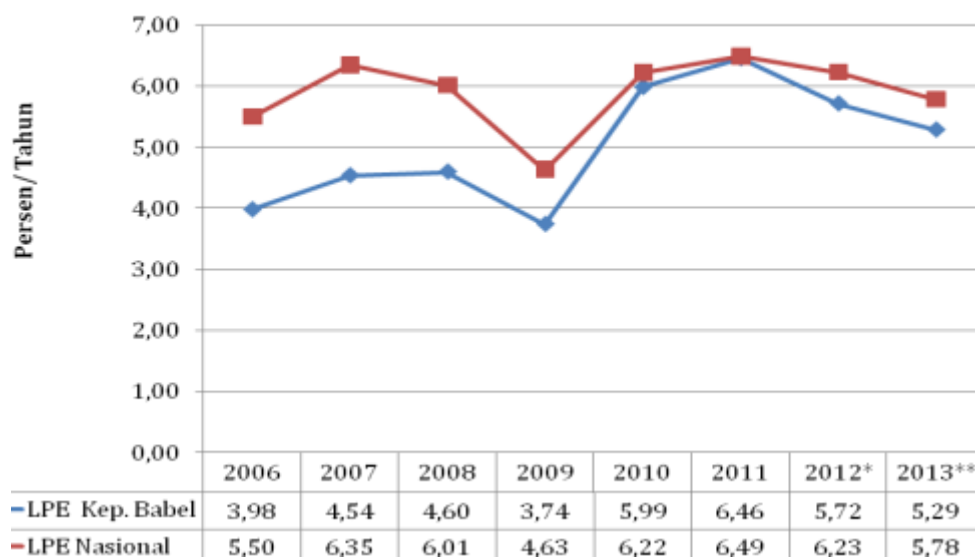
Perkembangan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

1. Pertumbuhan Ekonomi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki peran yang cukup penting bagi perekonomian wilayah dan nasional. Pada tahun 2013 perekonomian Kepulauan Bangka Belitung hanya berkontribusi sebesar 0,51 persen terhadap total output nasional (total PDRB 33 provinsi), dan 2,14 persen terhadap total output wilayah Sumatera (Gambar 1). Selama periode 2006-2013 secara keseluruhan kinerja perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung cukup baik, yang tumbuh dengan laju rata-rata 5,04 persen. Angka ini dibawah nasional yang tumbuh dengan laju rata-rata 5,90 persen pada periode yang sama.

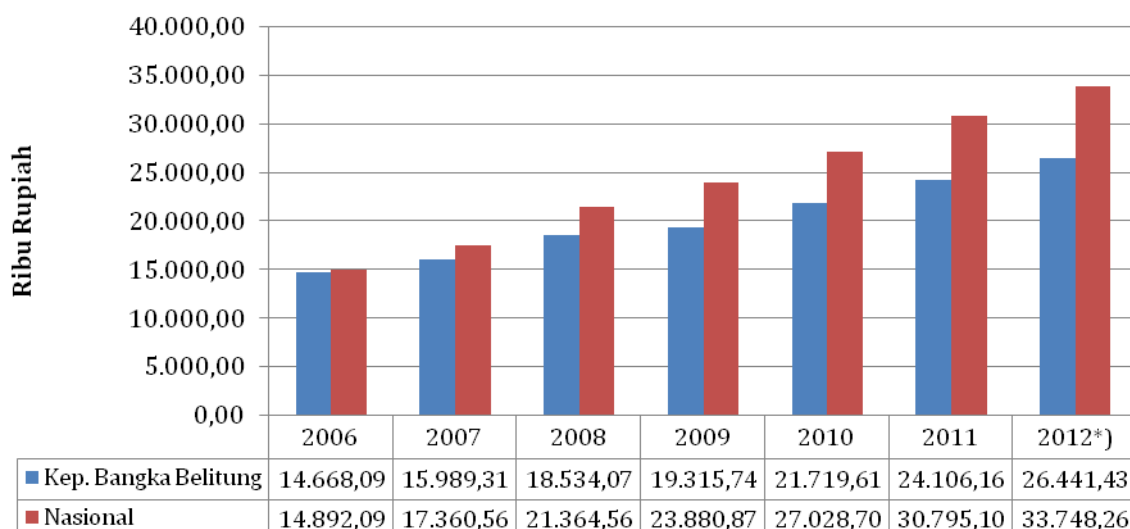
Gambar 1
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2000



Sumber: BPS, 2013

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan perkapita masyarakat juga meningkat. Jika pada tahun 2006 rasio antara PDRB per kapita Bangka Belitung dan PDB perkapita nasional adalah sebesar 98,49 persen, maka pada tahun 2012 rasionya mengecil menjadi 78,35 persen (Gambar 2). Mengingat kesejahteraan pada akhirnya diukur dalam unit individu, maka hal ini menegaskan perlunya kebijakan pengembangan ekonomi daerah secara simultan dengan pengendalian pertumbuhan penduduk, khususnya pertumbuhan penduduk alami.

Gambar 2
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

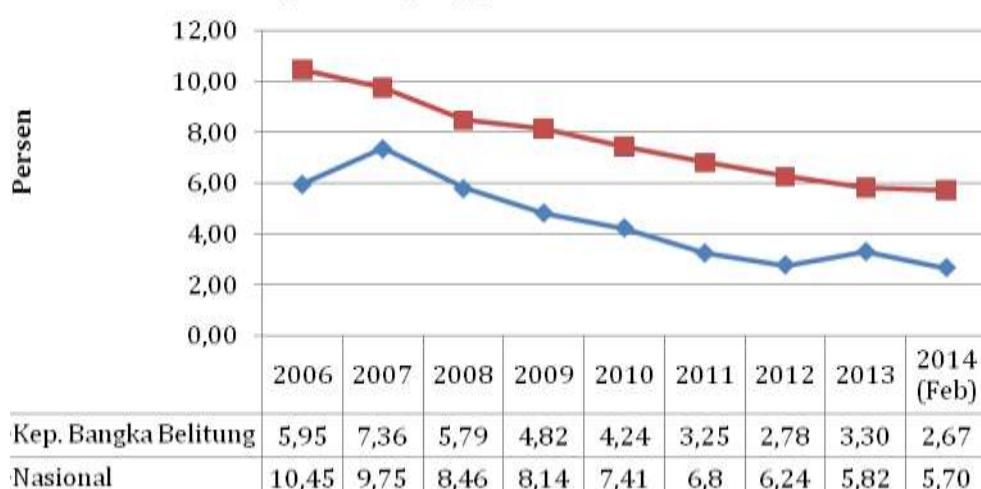


Sumber: BPS, 2013

2. Pengurangan Pengangguran

Indikator lain yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah tingkat pengangguran. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi daerah terlihat mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai sehingga tingkat pengangguran berhasil ditekan dan mengalami penurunan (Gambar 3). Secara keseluruhan tingkat pengangguran daerah tergolong rendah bila dibandingkan tingkat pengangguran nasional. Namun demikian, rendahnya tingkat pengangguran di tengah pendapatan per kapita yang rendah ini mengindikasikan rendahnya produktivitas pekerja di tingkat daerah.

Gambar 3
Tingkat Pengangguran Terbuka

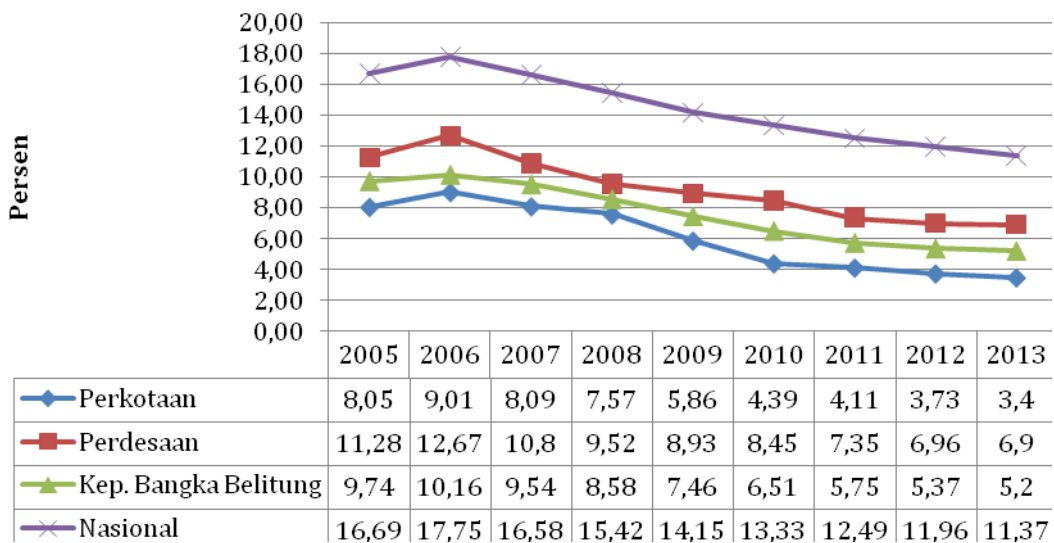


Sumber: BPS, 2014

3. Pengurangan Kemiskinan

Peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan tingkat pengangguran juga diiringi oleh penurunan tingkat kemiskinan daerah. Persentase penduduk miskin cenderung menurun sejak tahun 2006 sampai 2013. Penurunan kemiskinan terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan dengan pola yang hampir sama, namun tingkat kemiskinan di perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan. Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 kemiskinan di Kepulauan Bangka Belitung telah berkurang sebesar 4,95 persen (Gambar 4)

Gambar 4
Persentase Penduduk Miskin



Sumber: BPS, 2013

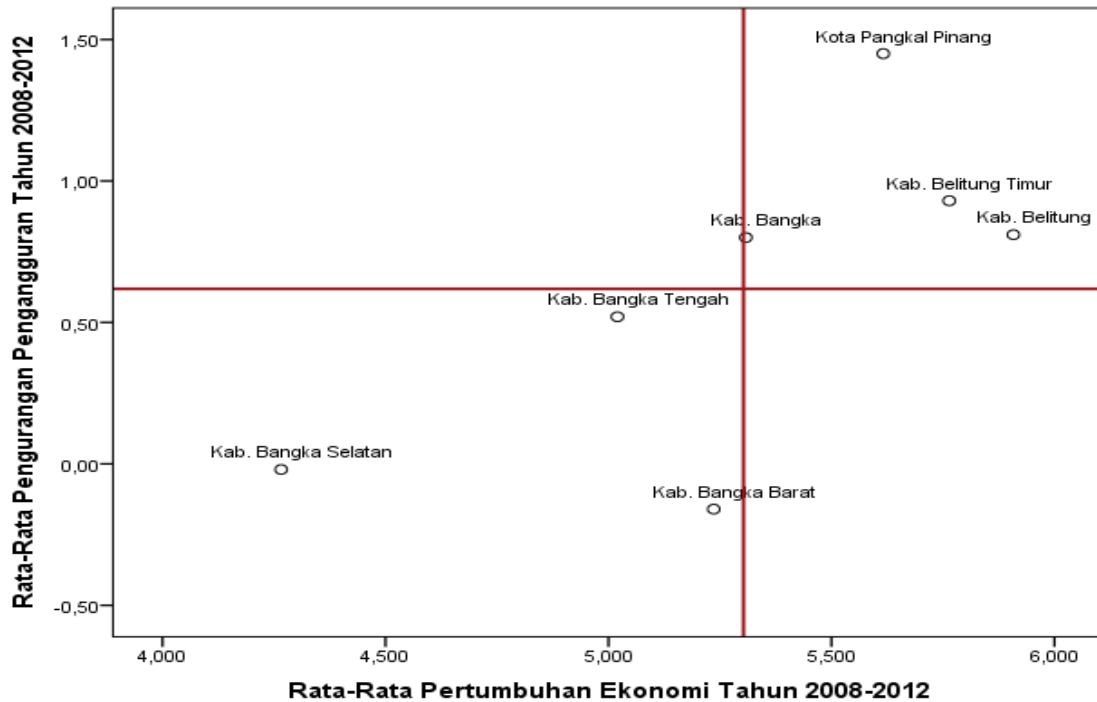
B. Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas seringkali dipahami sebagai peningkatan nilai tambah yang diikuti oleh perluasan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

Persebaran kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut (Gambar 5). *Pertama*, Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (*pro-growth, pro-job*). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Gambar 5
Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengurangan
Jumlah Pengangguran Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Kedua, tidak ada kabupaten yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata (*low growth, pro-job*).

Ketiga, Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah dan Bangka Barat terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-job*). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar. *Keempat*, tidak ada kabupaten terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro job*).

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

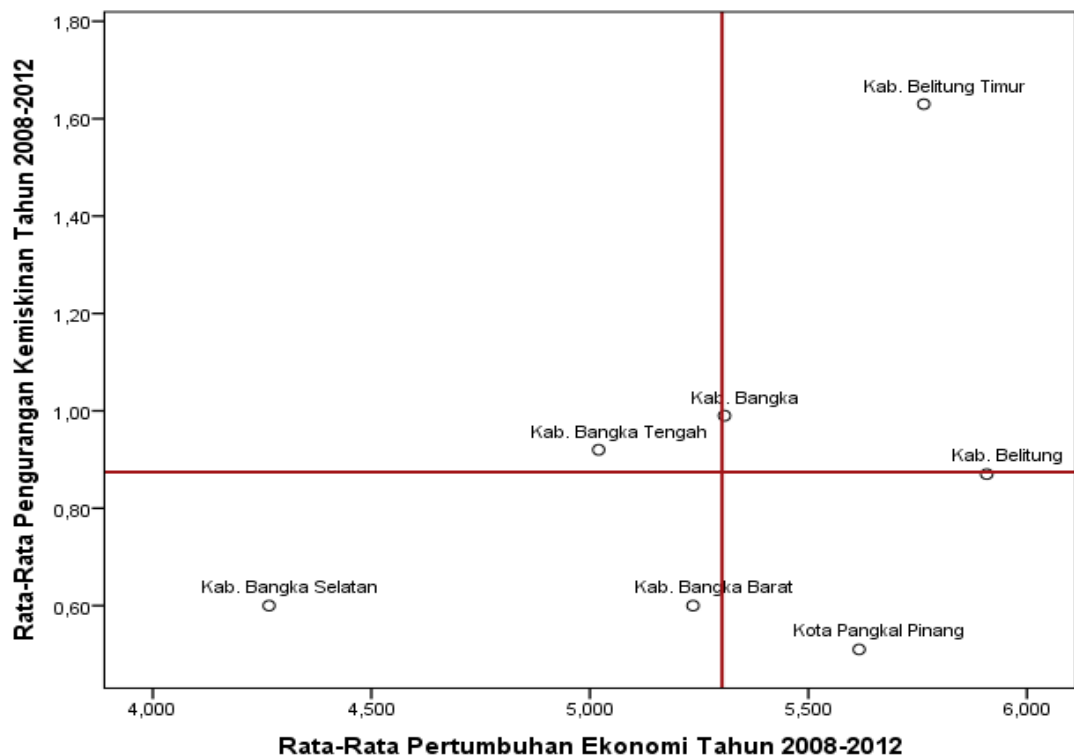
Gambar 6 menunjukkan persebaran kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan selama tahun 2008-2012 dengan penjelasan sebagai berikut. *Pertama*, Kabupaten Bangka dan Belitung Timur termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (*pro-growth, pro-poor*).

Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan.

Kedua, Kabupaten Bangka Tengah terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (*low growth, pro-poor*). Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangand dan jasa.

Ketiga, Kabupaten Bangka Barat dan Bangka Selatan terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

Gambar 6
Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengurangan
Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2008-2012



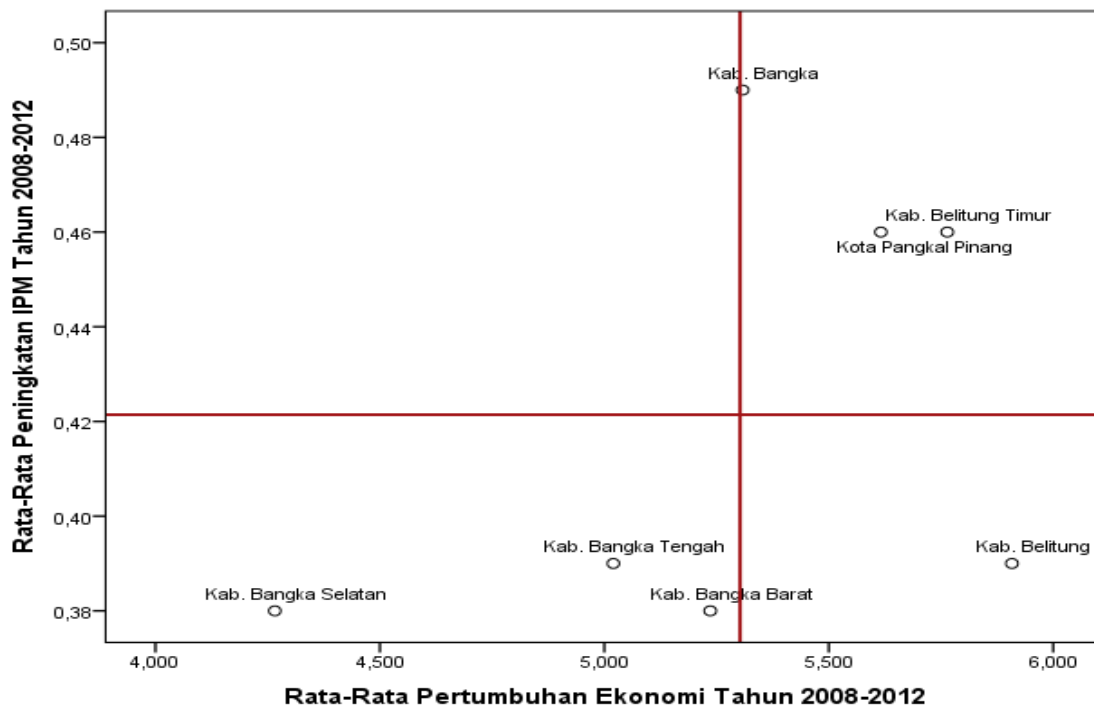
Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Keempat, Kabupaten Kota Pangkal Pinang dan Belitung terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah meningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

3. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM

Distribusi kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut (Gambar 7). *Pertama*, Kabupaten Belitung Timur, Bangka, dan Kota Pangkal Pinang termasuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Gambar 7
Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Peningkatan IPM Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Kedua, tidak ada kabupaten dan kota yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (*low growth, pro-human development*). *Ketiga*, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Bangka Barat terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

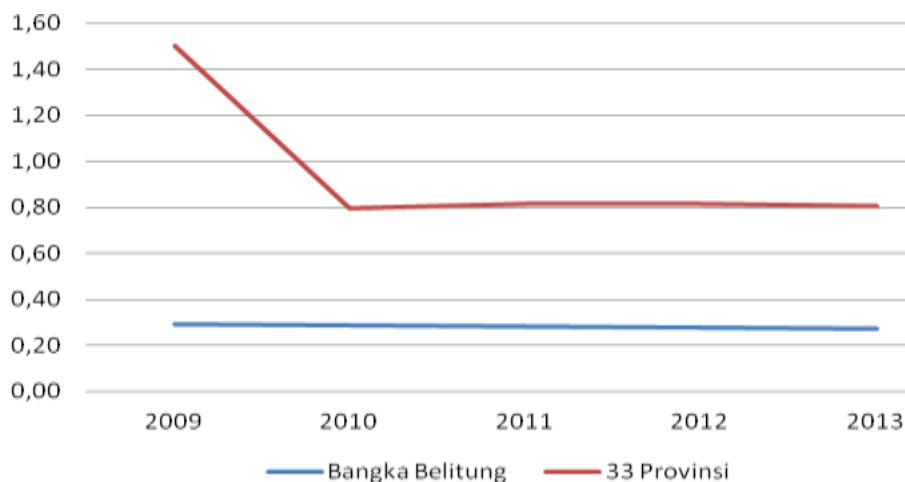
Keempat, Kabupaten Belitung terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

4. Kesenjangan Ekonomi

Tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditunjukkan dengan nilai indeks wiliamson dari tahun 2009-2013 tergolong rendah. Kesenjangan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada di bawah nasional dengan kecenderungan semakin meningkat. Penyebab kesenjangan ekonomi di Kepulauan Bangka Belitung adalah masih terbatasnya jangkauan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Kondisi di atas menghadapkan Kepulauan Bangka Belitung pada tantangan untuk meningkatkan, pemeratakan, dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya, serta jangkauan informasi sampai ke pelosok daerah

Gambar 8

Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson) 2009-2013



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Kepulauan Bangka Belitung terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah. Kesenjangan pendapatan kabupaten dan kota di Kepulauan Bangka Belitung lebih merata dibandingkan daerah lain. Kabupaten Bangka Barat memiliki PDRB perkapita tertinggi di Kepulauan Bangka Belitung. Kabupaten Bangka Barat merupakan pusat pertambangan timah sehingga turut berperan dalam meningkatkan perekonomian di daerah ini. Rata-rata pendapatan perkapita Kabupaten Bangka Barat selama tahun 2007-2012 besarnya hampir dua kali rata-rata kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 1
Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2012 (000/jiwa)

Kab/Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bangka	13.007	14.706	15.563	18.080	18.896	21.175
Belitung	13.155	15.294	16.601	18.536	20.718	23.439
Bangka Barat	26.024	30.891	32.935	36.434	4.002	43.077
Bangka Tengah	15.438	17.811	18.491	20.363	22.436	24.846
Bangka Selatan	15.507	17.484	17.934	19.797	21.788	23.448
Belitung Timur	15.317	17.942	19.553	22.203	24.507	27.589
Kota Pangkal Pinang	13.320	15.027	16.160	18.462	20.501	22.992
Bangka Belitung	15.989	18.564	19.316	21.720	24.106	26.441

Sumber: BPS, 2013

C. Penyebab Permasalahan Pembangunan

1. Ketergantungan Pada Sektor Primer Masih Besar

Struktur perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013 masih didominasi oleh sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan (Tabel 2). Pangsa terbesar industri pengolahan dimiliki oleh industri logam, dalam hal ini timah. Sektor industri pengolahan juga memiliki pangsa besar dalam perekonomian Kepulauan Bangka Belitung, namun sektor pendukung industri perannya masih di bawah 1 persen dalam perekonomian. Sementara itu potensi pariwisata turut meningkatkan kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran dalam mendorong perekonomian daerah.

Tabel 2
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha 2013

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Pertanian	19,06	23,50
2.	Pertambangan	12,58	12,32
3.	Industri Pengolahan	19,02	20,01
4.	Listrik, Gas, Air Minum	0,73	0,61
5.	Konstruksi	8,58	7,57
6.	Perdagangan, Hotel, Restoran	18,98	20,03
7.	Angkutan, Telekomunikasi	3,56	3,95
8.	Keuangan	2,82	3,99
9.	Jasa-jasa	12,67	8,02
Total PDRB		100.00	100.00

Sumber: BPS, 2013

Besarnya peran perdagangan dan pariwisata juga terlihat dalam penyediaan lapangan kerja di daerah. Selama lima tahun terakhir sektor inilah yang membuka kesempatan kerja terbanyak di samping sektor jasa-jasa. Di samping itu sektor pertanian tetap merupakan salah satu penyerap tenaga kerja utama di daerah. Sementara itu, peran sektor pertambangan juga menyusut dalam hal penciptaan lapangan kerja, seiring dengan mengecilnya perannya dalam pembentukan nilai tambah di daerah. Selama periode 2010-2014, sektor-sektor perekonomian yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan secara signifikan adalah sektor perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan (Tabel 3). Ke depan, sektor industri pengolahan masih perlu dikembangkan lagi sehingga mampu menyerap angkatan kerja baru dan menyerap tenaga kerja yang menumpuk di sektor pertanian kurang produktif

Tabel 3
Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, 2010-2014

No.	Lapangan Pekerjaan	2010	2014 (Feb)	Perubahan
1	Pertanian	157.975	178.017	20.042
2	Pertambangan	117.097	121.104	4.007
3	Industri Pengolahan	20.135	35.151	15.016
4	Listrik, Gas, Air	946	1.317	371
5	Bangunan	24.944	34.101	9.157
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	104.318	134.514	30.196
7	Angkutan & Telekomunikasi	17.880	16.820	-1.060
8	Keuangan	4.722	14.886	10.164
9	Jasa-Jasa	79.375	87.848	8.473
Total		527.392	623.758	96.366

Sumber: BPS, 2013

Tingginya kontribusi pertanian dan besarnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor ini mengindikasikan perekonomian daerah masih bertumpu pada sektor

primer. Ketergantungan pada komoditas primer paling tidak memiliki dua risiko. Pertama, harga komoditas primer cenderung bergejolak (*volatile*) dalam beberapa tahun ini. Tidak stabilnya harga ini lebih banyak merugikan dari pada menguntungkan produsen, khususnya petani, peternak, pekebun, dan nelayan. Ketika harga komoditas naik, keuntungan terbesar biasanya dinikmati oleh pedagang perantara. Sementara ketika harga komoditas jatuh, beban terbesar ditanggung oleh petani. Kedua, permintaan terhadap komoditas pertanian khususnya pangan relatif inelastis, dan sebaliknya pada produk manufaktur. Umumnya peningkatan pendapatan akan mendorong konsumsi barang-barang non pangan, seperti produk elektronik, perumahan, kendaraan, dan lain-lain. Oleh karenanya, perekonomian yang terlalu bertumpu pada sektor primer khususnya pertanian berisiko terjebak pada pertumbuhan lambat atau sedang.

Tabel 4
Nilai LQ Sektor Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung 2008-2012

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	1,65	1,66	1,74	1,76	1,83
a. Tanaman Bahan Makanan	0,39	0,39	0,41	0,45	0,47
b. Tanaman Perkebunan	5,33	5,45	5,79	5,73	5,88
c. Peternakan	0,41	0,46	0,47	0,49	0,51
d. Kehutanan	0,66	0,65	0,64	0,66	0,70
e. Perikanan	3,28	3,27	3,27	3,19	3,22
2. Pertambangan dan Penggalian	1,82	1,78	1,73	1,77	1,77
a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,41	0,38	0,38	0,39	0,40
b. Pertambangan Bukan Migas	3,76	3,49	3,26	3,20	3,02
c. Penggalian	2,92	2,93	2,87	2,99	2,97
3. Industri Pengolahan	0,83	0,85	0,84	0,82	0,79
a. Industri Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1). Pengilangan Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Gas Alam Cair (LNG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Bukan Migas	0,91	0,92	0,91	0,88	0,85
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0,73	0,69	0,72	0,78	0,79
a. Listrik	1,10	1,11	1,15	1,21	1,20
b. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Air Bersih	0,10	0,10	0,09	0,09	0,18
5. Konstruksi	0,99	1,02	1,04	1,12	1,16
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	1,12	1,14	1,13	1,12	1,11
a. Perdagangan Besar dan Eceran	1,28	1,31	1,27	1,26	1,23
b. Hotel	0,12	0,13	0,13	0,14	0,13
c. Restoran	0,47	0,48	0,50	0,52	0,55
7. Pengangkutan dan Komunikasi	0,44	0,41	0,39	0,38	0,38
a. Pengangkutan	0,86	0,85	0,85	0,86	0,90
1). Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Angkutan Jalan Raya	1,08	1,02	1,00	1,02	1,05
3). Angkutan Laut	0,93	0,93	0,98	1,05	1,03

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	0,64	0,61	0,57	0,62	0,65
5). Angkutan Udara	1,19	1,30	1,26	1,25	1,30
6). Jasa Penunjang Angkutan	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
b. Komunikasi	0,11	0,09	0,09	0,08	0,08
8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	0,35	0,37	0,38	0,39	0,41
a. Bank	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0,17	0,16	0,16	0,17	0,18
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Real Estat	0,91	0,95	0,99	1,02	1,08
e. Jasa Perusahaan	0,12	0,11	0,12	0,12	0,12
9. Jasa-jasa	0,73	0,75	0,78	0,81	0,83
a. Pemerintahan Umum	1,15	1,19	1,27	1,35	1,42
b. Swasta	0,40	0,42	0,41	0,42	0,43
1). Jasa Sosial Kemasyarakatan	0,40	0,42	0,42	0,43	0,44
2). Jasa Hiburan dan Rekreasi	0,03	0,02	0,02	0,04	0,04
3). Jasa Perorangan dan Rumah tangga	0,45	0,46	0,46	0,47	0,47

LQ dihitung dengan menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

Sumber : BPS, 2012 (diolah)

Jika diamati sektor-sektor *tradable* (bisa diperdagangkan antardaerah) daerah, nampak bahwa sektor basis daerah adalah perkebunan, perikanan, dan pertambangan. Sektor-sektor tersebut memiliki nilai *Location Quotient* lebih besar dari satu, yang mengindikasikan bahwa Kepulauan Bangka Belitung memiliki keunggulan komparatif di sektor-sektor tersebut dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Sementara itu keunggulan komparatif Kepulauan Bangka Belitung di sektor industri pengolahan adalah pada subsektor industri logam dasar, khususnya pengolahan timah, serta industri semen dan galian bukan logam.

2. Pertumbuhan Ekonomi Didorong Konsumsi dan Investasi

Dari sisi penggunaan perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh konsumsi rumah tangga, ekspor, dan impor (Tabel 5). Nilai impor yang tinggi mengindikasikan aktivitas investasi lebih banyak berasal dari luar daerah, sedangkan investasi domestik relatif belum berkembang. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah jika investasi yang terjadi banyak terkonsentrasi di pertambangan, umumnya kinerja penyerapan tenaga kerjanya terbatas dan kemampuannya mendorong pengembangan industri lainnya juga rendah. Dengan karakter sektoral seperti ini, perekonomian daerah yang bergantung pada investasi dari luar dapat memicu kesenjangan antara pendatang dan penduduk lokal serta persoalan sosial lainnya. Oleh karena itu diperlukan upaya mendorong investasi di sektor-sektor padat karya dan berdampak luas di daerah.

Tabel 5
Struktur PDRB Menurut Penggunaan 2013

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Konsumsi Rumah Tangga	54,69	49,87
2.	Konsumsi Lembaga Nirlaba	0,97	0,84
3.	Konsumsi Pemerintah	14,80	11,79
4.	PMTB	27,02	24,85
5.	Perubahan Stok	4,24	5,70
6.	Ekspor	54,59	53,09
7.	Impor	56,31	26,14
		100.0	100.0

Sumber: BPS, 2014

Mengingat pentingnya investasi domestik bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu diperhatikan adalah peningkatan iklim usaha didaerah yang kondusif bagi investasi. Salah satu indikatornya adalah kemudahan pelayanan perijinan. Penerapan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) perlu terus didorong dan diarahkan pada penyederhanaan prosedur, pengurangan lama waktu proses perijinan dan biaya yang diperlukan. Ukuran keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut adalah peningkatan efisiensi perijinan yang harus tercermin dari menurunnya biaya dan waktu yang diperlukan oleh para pelaku usaha.

3. Rendahnya Kualitas Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur wilayah sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah karena perannya dalam memfasilitasi pemusatan maupun penyebaran aktivitas ekonomi secara alami. Defisiensi infrastruktur baik secara kuantitas maupun kualitas akan menghambat distribusi barang secara efisien, yang merupakan salah satu pilar utama daya saing wilayah. Dari sisi kuantitas, jaringan jalan di Kepulauan Bangka Belitung dapat dikatakan relatif cukup. Hal ini dapat dilihat dari kerapatan jalan wilayah, yaitu ukuran yang merupakan rasio antara panjang jalan dan luas wilayah. Kerapatan jalan di Kepulauan Bangka Belitung lebih tinggi dari kerapatan jalan nasional meskipun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan kerapatan jalan di Pulau Jawa (Tabel 6).

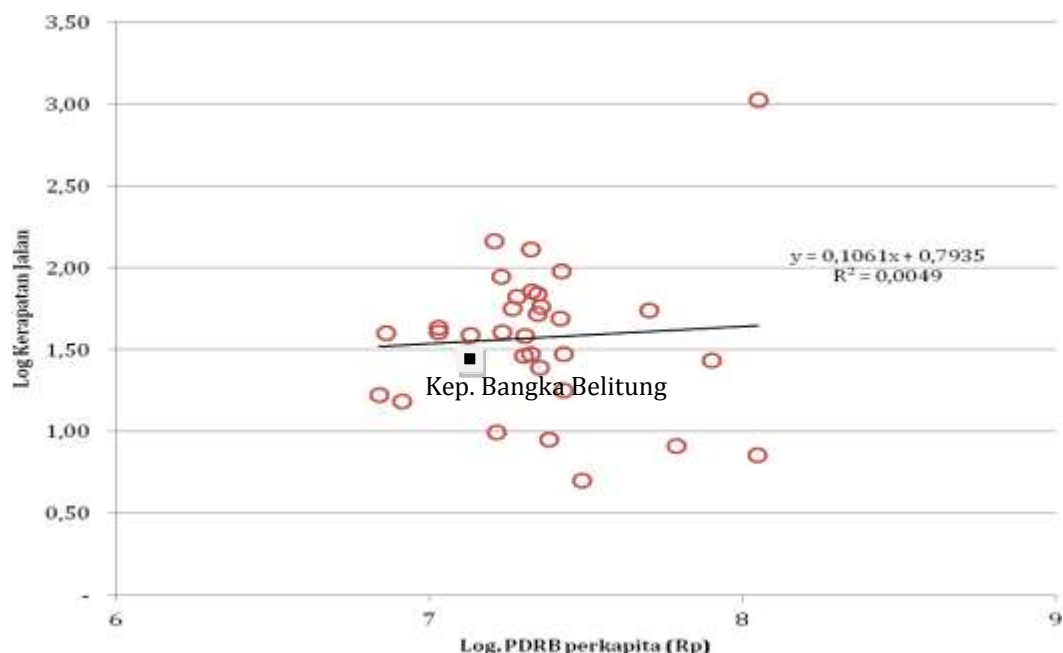
Tabel 6
Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2012

No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
1	DKI Jakarta	111.913	1.068,36
2	DIY	16.054	146,56
3	Bali	20.948	130,28
4	Jawa Timur	26.274	95,37
5	Jawa Tengah	16.864	88,75
6	Jawa Barat	21.274	72,08
7	Sulawesi Selatan	22.151	69,68
8	Banten	19.038	66,81
9	Sulawesi Utara	22.624	57,89
10	Lampung	18.460	56,44
11	Kep. Riau	50.174	54,95
12	Sumatera Barat	22.035	52,36
13	Sumatera Utara	26.185	49,50
14	NTB	10.691	43,55
15	Gorontalo	10.703	40,85
16	Sulawesi Barat	17.012	40,62
17	NTT	7.236	39,95
18	Bengkulu	13.522	38,99
19	Aceh	20.164	38,76
20	Sulawesi Tenggara	13.112	30,71
	Kep. Bangka	26.784	
21	Belitung		29,93
22	Sulawesi Tengah	21.052	29,73
23	Kalimantan Selatan	20.051	29,28
24	Riau	79.786	27,25
25	Jambi	22.508	24,81
26	Sumatera Selatan	26.742	17,86
27	Maluku Utara	6.929	16,72
28	Maluku	8.134	15,39
19	Kalimantan Barat	16.421	10,00
30	Kalimantan Tengah	23.987	8,96
31	Papua Barat	61.462	8,24
32	Kalimantan Timur	111.210	7,22
33	Papua	30.713	5,06
	Indonesia	33.531	25,99

Sumber: BPS (2012), Statistik Kementerian PU (2013)

Dengan membandingkan kerapatan jalan antarprovinsi dengan tingkat pendapatan per kapita, dari hasil regresi 33 provinsi di Indonesia diperoleh gambaran bahwa tingkat kerapatan jalan di Kepulauan Bangka Belitung masih di atas rata-rata kerapatan jalan di perekonomian dengan pendapatan per kapita yang setara. Dengan menggunakan ukuran ini terlihat bahwa posisi Kepulauan Bangka Belitung di bawah rata-rata kerapatan jalan 33 provinsi di Indonesia, yang menunjukkan bahwa provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami defisiensi infrastruktur jalan (Gambar 10).

Gambar 10
Hubungan antara Kerapatan Jalan dan GDP Per Kapita Tahun 2012



Sumber: BPS (2013), Statistik Kementerian PU (2013)-diolah

Secara kualitas, kondisi jalan di Kepulauan Bangka Belitung terdapat sekitar 25 persen yang belum beraspal (Tabel 7). Jalan beraspal tentu memiliki daya dukung berkali lipat dibandingkan jalan non aspal terhadap pergerakan barang antardaerah. Jika dilihat dari kondisi permukaannya, maka masih terdapat 35 persen jaringan jalan dalam kondisi tidak baik (sedang atau rusak). Kondisi jaringan jalan daerah ini relatif baik bila dibandingkan dengan rata-rata daerah lain. Namun demikian untuk memacu investasi dan daya saing daerah, kualitas jalan wilayah masih perlu ditingkatkan. Kondisi jaringan jalan yang rusak tentu mengakibatkan bertambahnya waktu tempuh distribusi barang, mempercepat kerusakan armada transportasi, dan meningkatkan risiko kerusakan komoditas selama pengiriman, dan sebagai akibatnya biaya distribusi menjadi tinggi.

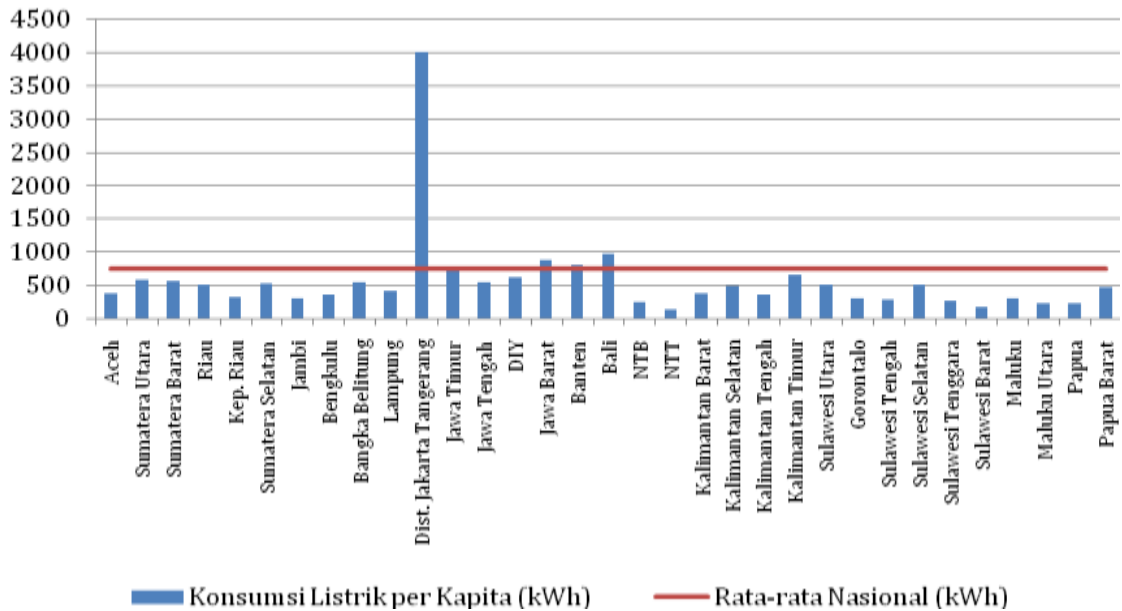
Tabel 7
Jalan Menurut Jenis Permukaan, 2012

PROVINSI	JENIS PERMUKAAN JALAN								Total	
	Aspal		Kerikil		Tanah		Lainnya			
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Kep. Bangka Belitung	3.309	75	856	19	271	6	2	0	4.438	100
Sumatera	74.399	50	30.509	20	39.739	27	5.258	4	149.905	100
INDONESIA	258.743	59	72.934	17	91.444	21	14.638	3	437.759	100

Sumber: BPS, 2012

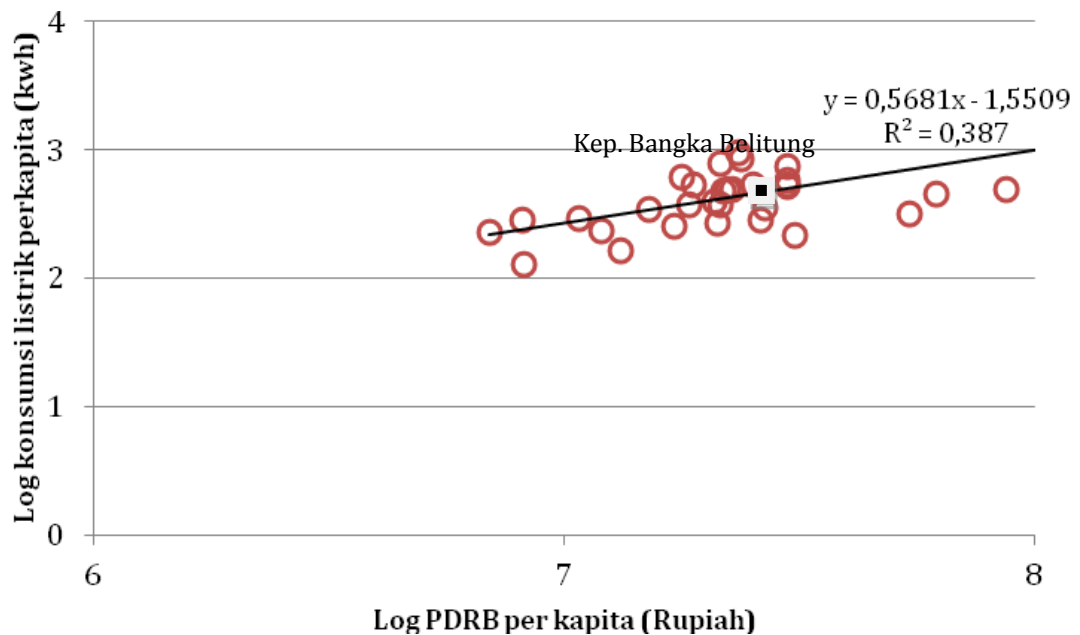
Infrastruktur lain yang memfasilitasi industrialiasi adalah listrik. Jika dilihat dari tingkat konsumsi listrik per kapita, kondisi di Kepulauan Bangka Belitung relatif rendah dan di bawah angka rata-rata nasional (Gambar 11).

Gambar 11
Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2013



Sumber: Statistik PLN, 2013

Gambar 12
Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2013



Sumber: BPS (2013), Statistik PLN (2013) – diolah

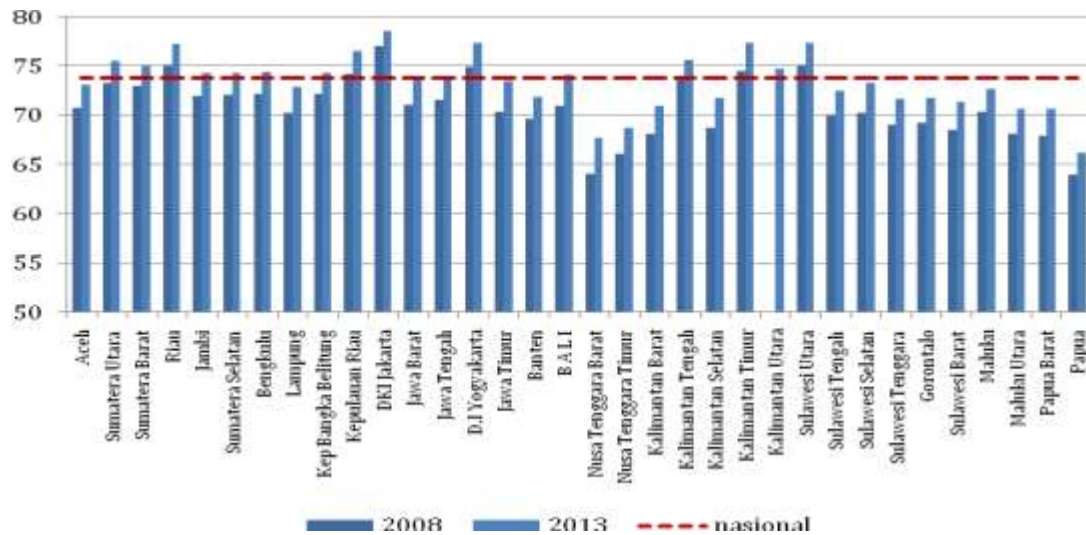
Apabila konsumsi listrik ini dibandingkan dengan provinsi-provinsi dengan perekonomian yang memiliki tingkat pendapatan setara, konsumsi listrik per kapita di Kepulauan Bangka Belitung relatif tertinggal (Gambar 12). Mengingat umumnya konsumsi listrik di daerah dibatasi oleh tingkat ketersediaannya di daerah, maka hal ini menunjukkan listrik merupakan salah satu pembatas bagi pertumbuhan wilayah.

4. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Faktor kualitas sumber daya manusia tidak bisa diabaikan dalam upaya percepatan pertumbuhan daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan memfasilitasi inovasi dan kemajuan teknologi dalam suatu perekonomian. Kemajuan teknologi inilah yang menjadi penentu keberlanjutan pertumbuhan dalam jangka panjang.

Kualitas sumber daya manusia di Kepulauan Bangka Belitung yang ditunjukkan melalui nilai IPM relatif meningkat tahun 2013 dibandingkan tahun 2008 dan berada di atas IPM nasional sebesar 73,81 (Gambar 13). IPM Kepulauan Bangka Belitung berada pada peringkat 14 secara nasional pada tahun 2013 dengan nilai IPM sebesar 74,29. Pada indikator usia harapan hidup, terjadi perbaikan dari 68,6 tahun pada tahun 2008 menjadi 69,46 tahun pada tahun 2013. Rata-rata lama sekolah di Kepulauan Bangka Belitung meningkat dari 7,37 tahun pada 2008 menjadi 7,73 tahun pada 2013. Sementara itu pada indikator angka melek huruf, capaian di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2008 dan 2013 meningkat dari 95,57 menjadi 96,44 persen, lebih tinggi dari capaian nasional 94,14 persen.

Gambar 13
Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2008 dan 2013

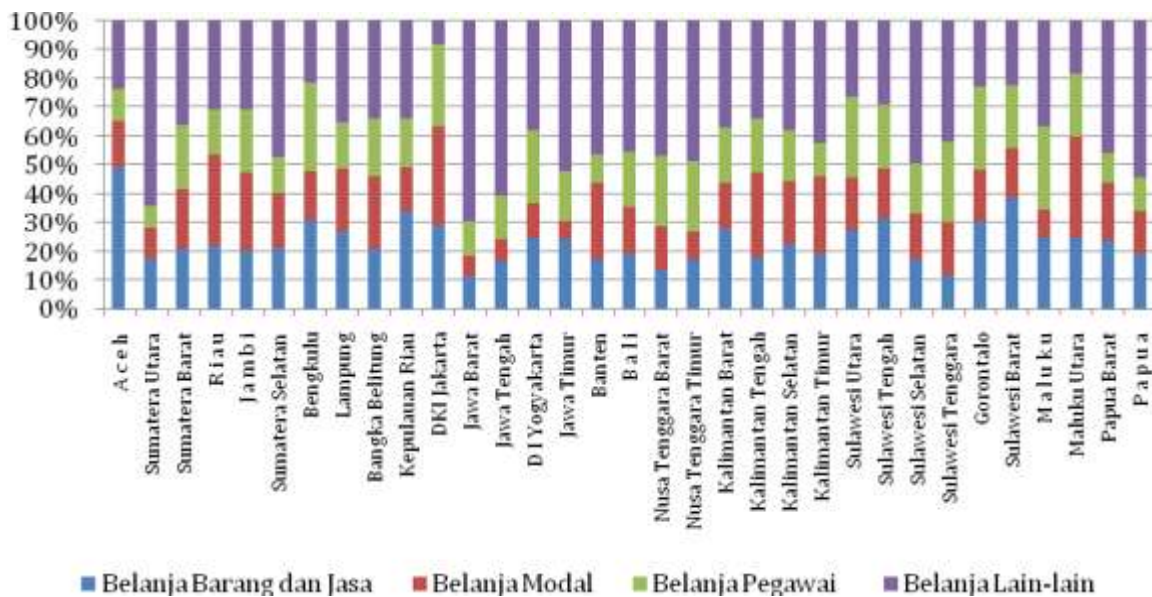


Sumber: BPS, 2013

5. Kualitas Belanja Pemerintah Daerah Kurang Mendukung Pertumbuhan

Terbatasnya kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah menuntut peran pemerintah dalam pembiayaan prasarana publik. Berdasarkan data total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2013, porsi belanja modal dalam total belanja APBD di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 25,26 persen, sementara porsi belanja pegawai, meliputi belanja pegawai dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung besarnya 20,14 persen (Gambar 14).

Gambar 14
Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2013



Sumber: BPS, 2013

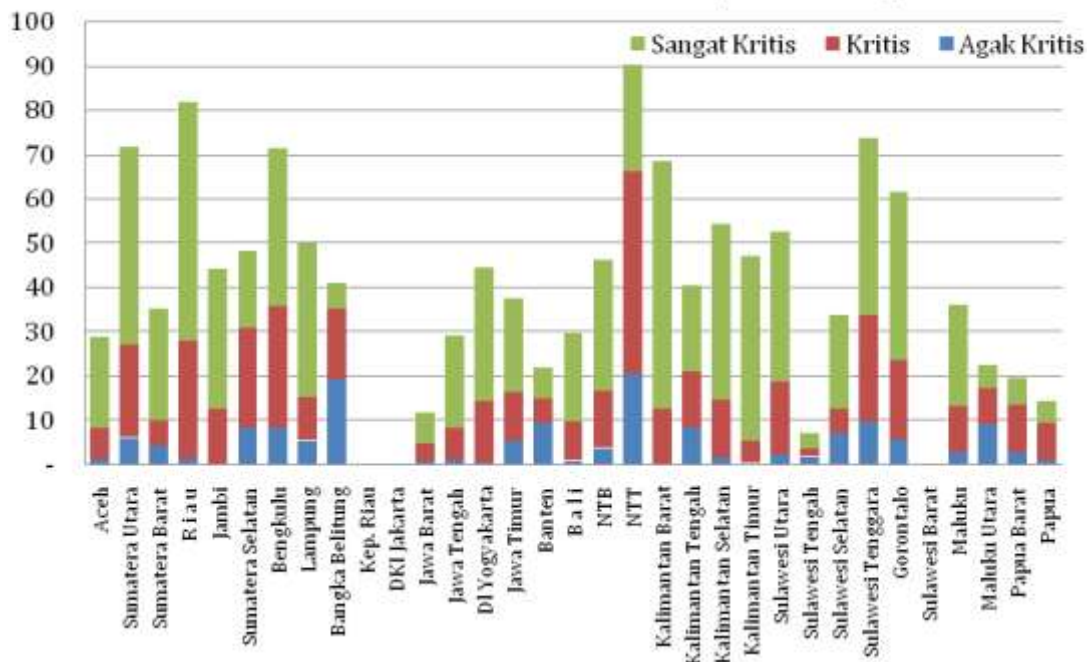
Ke depan perlu didorong perbaikan komposisi belanja pemerintah daerah ini yang lebih mengarah pada belanja modal. Belanja modal memiliki dampak langsung yang relatif besar kepada perekonomian. Meskipun secara umum porsi investasi pemerintah lebih kecil dibandingkan investasi swasta, namun perannya tidak tergantikan dalam suatu perekonomian. Pembangunan prasarana publik seperti jalan, saluran irigasi, dan jaringan listrik mutlak memerlukan peran pemerintah. Peran investasi pemerintah ini dirasa semakin penting di daerah-daerah yang level investasi swastanya relatif rendah. Investasi pemerintah dalam konteks ini adalah sebagai perintis dan pembuka jalan bagi masuknya investasi swasta

6. Daya Dukung Lingkungan Berkurang

Pertumbuhan daerah yang berbasis pada sektor pertambangan ternyata diiringi dengan memburuknya daya dukung lingkungan. Terlebih lagi dengan perkembangan pesat perkebunan sawit dalam sepuluh tahun terakhir. Tingkat kerusakan lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dibandingkan daerah-daerah lain khususnya sesama wilayah kepulauan (Gambar 15). Karakter

wilayah kepulauan menuntut upaya ekstra untuk mempertahankan daya dukung lingkungan mengingat kerentanannya yang relatif tinggi.

Gambar 15
Persentase Luas Lahan Kritis terhadap Luas Wilayah



Sumber: BPS, 2012

Luas lahan kritis pada tahun 2012 telah mencapai sekitar 40 persen dari total luas wilayah. Rendahnya daya dukung lingkungan mengancam keberlanjutan pertumbuhan, apalagi untuk perekonomian yang masih bertumpu pada sumber daya alam dan jasa lingkungan. Dampak yang ditimbulkan bisa sangat luas yang meliputi penurunan tingkat kesuburan tanah, menurunnya keragaman hayati, meningkatnya kerentanan bencana alam, pendangkalan daerah aliran sungai, dan berkurangnya kualitas sumber daya air wilayah. Diperlukan rehabilitasi dan konservasi di sepanjang daerah aliran untuk mencegah sedimentasi berlebihan dan mengurangi risiko bencana tanah longsor dan banjir.

D. Prospek Pembangunan Tahun 2015

Dengan potensi yang dimilikinya serta perkiraan dinamika lingkungan yang mempengaruhi, perekonomian Kepulauan Bangka Belitung diperkirakan akan tumbuh positif hingga tahun 2015. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap menjadi sumber pertumbuhan, namun peran investasi diperkirakan akan meningkat. Manfaat dari peningkatan kualitas infrastruktur wilayah ini diperkirakan juga akan dinikmati oleh daerah-daerah di luar wilayah Sumatera melalui proses keterkaitan antarindustri (*linkages*). Berdasarkan pada kinerja pembangunan selama ini serta modal pembangunan yang dimiliki dapat digambarkan prospek Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mencapai target utama RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:

1. Sasaran pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 5,5 – 7,5 persen dapat tercapai. Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 diperkirakan meningkat seiring membaiknya pertambangan dan membaiknya ekspor CPO, crumb rubber, dan timah. Produksi timah diperkirakan masih meningkat seiring harga yang terjaga di level tinggi. Sementara itu di sektor pertanian, dengan pulihnya harga karet intensitas penyadapan karet akan kembali normal. Harga CPO dan TBS diperkirakan masih terjaga pada level yang tinggi seiring membaiknya permintaan dunia. Meningkatnya produksi tambang dan perkebunan ini akan meningkatkan sektor perekonomian di Provinsi Bangka Belitung.
2. Sasaran pengurangan tingkat kemiskinan dalam Buku III RPJMN 2015-2019 adalah 3,9 – 2,7 persen, sedangkan pada tahun 2013 tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 5,21 persen, untuk itu diperlukan upaya konsisten untuk menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi ini. Selama kurun waktu 2014-2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 2,51 poin persentase atau 0,42 poin persentase per tahun.
3. Peluang untuk mempercepat penurunan kemiskinan terbuka bila dilakukan pembenahan pada produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan industri kecil, di mana konsentrasi penduduk miskin biasanya berada. Di sisi lain, tantangan berat bagi penurunan kemiskinan daerah adalah dampak dari kenaikan harga BBM (pengurangan subsidi BBM) yang cepat atau lambat akan terjadi. Pemerintah daerah perlu menyiapkan koordinasi horisontal dan vertikal untuk mengantisipasi kemungkinan hal ini terjadi, terutama menyiapkan jaring-jaring pengaman untuk memperkecil dampak yang diterima penduduk miskin dan hampir miskin.

E. Penutup

1. Isu Strategis

Dari analisis di atas, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis pembangunan daerah. Isu-isu tersebut adalah permasalahan yang bila ditangani akan berdampak besar pada pencapaian sasaran-sasaran utama pembangunan daerah. Sebaliknya bila permasalahan tersebut diabaikan, maka berpotensi menimbulkan dampak buruk berantai pada sasaran-sasaran pembangunan lainnya. Isu-isu strategis tersebut adalah:

- a. Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, dan perikanan
- b. Peningkatan iklim investasi daerah
- c. Pengembangan industri unggulan daerah
- d. Pembangunan infrastruktur wilayah
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- f. Peningkatan kualitas belanja pemerintah daerah
- g. Pemulihan daya dukung lingkungan

2. Rekomendasi Kebijakan

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, disarankan beberapa kebijakan operasional sebagai berikut:

- a. Peningkatan penyuluhan pertanian dan akses petani dan nelayan terhadap teknologi tepat guna.
- b. Perbaikan distribusi dan akses petani pada sarana produksi pertanian.
- c. Penyederhanaan proses perijinan usaha dengan mengurangi waktu dan besarnya biaya yang diperlukan.
- d. Pengaspalan, pemantapan dan pemeliharaan jaringan jalan wilayah.
- e. Peningkatan kapasitas produksi listrik wilayah.
- f. Peningkatan akses pendidikan menengah di perdesaan.
- g. Peningkatan akses pelayanan kesehatan di perdesaan.
- h. Peningkatan alokasi belanja modal pemerintah untuk infrastruktur daerah.
- i. Rehabilitasi lahan kritis khususnya di sekitar bekas pertambangan.
- j. Pengendalian pemanfaatan lahan untuk ekspansi perkebunan dan pertambangan.